



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
**UNIT KERJA** : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **KUSTINAH**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **857800**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. **435.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/89 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 734 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 10.000.000
3. Tanah Seluas 793 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 15.000.000
4. Tanah Seluas 178 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. Tanah Seluas 170 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 5.000.000
6. Tanah Seluas 1362 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. **4.000.000**

1. MOTOR, HONDA NF100D/SOLO Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI LX 150 C (KLX 150 S) / SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. **3.200.000**

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. **----**

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. **24.000.000**

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. **----**

**Sub Total**

Rp. **466.200.000**



III. HUTANG

Rp.

137.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

329.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.